

**IMPLEMENTASI PROGRAM PPA-PKH DI KABUPATEN
PROBOLINGGO 2013 (PENARIKAN PEKERJA ANAK KE SEKOLAH
FORMAL/INFORMAL)**

Andhi Nur Rahmadi

Universitas Muhammadiyah Malang

Andhi.iansyah@gmail.com

Abstrak

Paper ini membahas mengenai penarikan pekerja anak ke sekolah non formal/ kesetaraan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Masalah eksploitasi terhadap pekerja anak bukan hanya soal upah, melainkan soal jam kerja yang panjang, resiko kecelakaan, gangguan kesehatan, dan menjadi obyek pelecehan dan kesewenangan orang dewasa. Dalam beberapa kajian, mayoritas pekerja anak bekerja lebih dari 7 jam per hari. Padahal berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia kurang dari 12 tahun tidak boleh bekerja, usia 13-14 tahun hanya boleh bekerja 3 jam per hari, dan usia 15-17 tahun boleh bekerja 8 jam per hari tetapi dalam kondisi yang tidak membahayakan fisik dan mental. Kenyataan di lapangan, pekerja anak sebagian besar berusia 13-14 tahun yang bekerja rata-rata selama 6-7 jam per hari. Bahkan banyak anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh anak-anak. Memang pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelamatkan anak miskin melalui Program Penarikan Pekerja Anak menuju Program Keluarga Harapan (PPA – PKH). Tetapi hal ini tidak cukup karena persoalan utamanya adalah kemiskinan struktural. Pemberian beasiswa bagi anak miskin hanya ibarat memadamkan kebakaran. Oleh sebab itu, selain memberikan bantuan subsidi, pemerintah harus serius memberdayakan rakyat miskin dengan menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan.

Kaca Kunci : Implementasi Kebijakan, Pekerja Anak, Kemiskinan, PPA-PKH

ABSTRACT

This paper description about withdrawal of child's labor to school or training center. One of the important stages in the cycle of public policy is policy implementation. Implementation is often considered just an implementation of what has been decided by decision makers, as if the stage is less influential. But in reality, the implementation stage is so important because a policy will not mean anything if it can not be implemented properly. Exploitation of child labor is not just about wages, but about long working hours, the risk of accidents, health problems, and become the object of harassment and abuse adults. In some studies, the majority of child laborers work more than 7 hours per day. Though based on Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, age less than 12 years should not be working, 13-14 years of age may only work 3 hours/day, and 15-17 years of age may work 8 hours/day but in a condition that does not endanger physically and mentally. Reality on the ground, most of the working children aged 13-14 years who work an average of 6-7 hours/day. In fact, many children are working in hazardous sectors and inhuman to be done by the children. Indeed, the government has made several attempts to save the poor children through the PPA program - PKH. But this is not enough because the main problem is structural poverty. That is, as long as the wheel rotates, the structural poverty child labor will continue to mushroom. Scholarships for poor children just like putting out fires. Therefore, in addition to providing assistance subsidy, the government should seriously empower the poor by implementing the principles of social economy.

Keywords: Implementation, child labor, poverty, PPA-PKH

A. PENDAHULUAN

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. (Efendi, 1989;137). Upaya perlindungan tenaga kerja yang dapat menjangkau seluruh tenaga kerja baik dewasa maupun tenaga kerja anak, terlebih mengenai tenaga kerja anak akhir-akhir ini banyak disorot dan telah menjadi isu nasional bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa.

Indonesia mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari hasil analisa masih banyak industri maupun *home industry* yang masih mempekerjakan anak dalam memproduksi barang atau jasa, usia anak yang bekerja semestinya menempuh pendidikan SMP dan SMA. Masih banyak pengusaha yang mengeksploitasi para pekerja anak di Kabupaten Probolinggo di karenakan upah mereka yang sangat murah dan masih mempunyai tenaga yang cukup kuat untuk bekerja seperti di pabrik pembuatan tahu, pakan ternak, maupun pabrik – pabrik atau *home industry* lainnya.

Dalam perkembangannya kondisi anak saat ini yang ada di Kabupaten Probolinggo adalah sangat baik di mana dalam hal ini masih banyak anak yang ingin melanjutkan pendidikannya melalui kejar paket untuk mendapatkan ijazah yang mana si anak mendapatkan pendampingan dari tutor untuk mendapatkan pelajaran yang akan di ujikan dalam menempuh kejar paket. Tutor senantiasa mendekati ke tempat kerja atau ke rumah pekerja anak untuk menumbuhkan semangat belajar dan supaya tidak mengganggu pekerjaan mereka dan ada juga pekerja anak yang memilih kembali ke sekolah formal ini adalah sebuah indikasi baik dimana semangat belajar para pekerja anak ini masih sangat tinggi meskipun mereka masih terbentur dengan pekerjaan dan dari sektor ekonomi.

Dalam masing – masing shelter telah di tetapkan target dan realisasi yang harus di capai dalam pengentasan pengurangan pekerja anak seperti contoh di dalam shalter BLK Kraksaan Kec Keraksaan target dan realisasi 60 anak dan terbagi ke dalam kejar paket A sebanyak 9 anak, paket B 37 anak, paket C 9 anak dan ketrampilan di BLK sebanyak 5 anak. Selain di shelter di Kraksaan masih ada shelter yang tersebar di Kabupaten Probolinggo seperti di PP. Miftahul Jannah Kecamatan Gading dan PP. Raudlotus Salafiyah Kecamatan Tongas

Kegiatan PPA-PKH bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak yang putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk ditarik dari tempat kerja dan dikembalikan ke dunia pendidikan melalui pendampingan di shelter. Output dari kegiatan ini adalah berkurangnya jumlah pekerja anak dari RTSM serta peningkatan partisipasi belajar anak. Pada tahun 2012 kegiatan ini akan dilaksanakan di 84 (delapan puluh empat) Kabupaten/Kota pada 21 (dua puluh satu) Provinsi dengan target menarik 10.750 pekerja anak. Melihat dari permasalahan yang sudah dijelaskan maka tujuan penelitan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Untuk mengetahui sejauhmana implementasi program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan di Kabupaten Probolinggo ”Diharapkan penelitian ini dapat dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dalam pengentasan pekerja anak agar bisa mendukung program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga

harapan di Kabupaten Probolinggo. Sehingga dalam target Nasional pada tahun 2014 bisa tercapai yaitu tentang Indonesia bisa bebas dari para pekerja anak. Oleh karena itu penulis mengharapkan dengan di adakan penelitian ini bisa sedikit banyak menyumbangkan pemikirannya dalam masalah Nasional penarikan pekerja anak.

B. Tinjauan Pustaka

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Grindle bahwa : “sesungguhnya tidak semata – mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”. Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya. (Sudiyono, 2007;80)

b. PPA-PKH

PPA-PKH pada intinya memberikan pendampingan pada pekerja anak yang telah ditarik dari pekerjaannya agar mempunyai motivasi kembali untuk memasuki dunia pendidikan. Penentuan pekerja anak sebagai calon penerima manfaat ber–dasarkan skala prioritas. Prioritas pertama adalah pekerja anak dari RTSM putus sekolah dan bekerja pada BPTA, prioritas kedua adalah pekerja anak dari RTSM putus sekolah usia di bawah 13 tahun, prioritas ketiga adalah pekerja anak dari RTSM putus sekolah usia 13 tahun – 18 tahun. Bila hal ini belum mencukupi dapat menggunakan urutan prioritas berikutnya atau juga dapat menggunakan data RTSM milik Departemen Sosial untuk diverifikasi kembali keberadaan pekerja anaknya.

Dari permasalahan yang ada di tingkat Kabupaten dengan tidak tercukupinya calon penerima manfaat sesuai kuota yang ada, selanjutnya melalui surat Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnake) Depnakertrans, calon penerima manfaat dapat diambilkan dari data pekerja anak yang ada di masing-masing daerah di luar data BPS, asalkan dapat dipercaya dan dilaporkan ke Depnakertrans. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kuota calon penerima manfaat sesuai yang telah ditetapkan.

c. Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.(leo,2008;1) Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian diskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat Individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian (moleong,2006;11) Dalam penelitian dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena hasil pengamatan peneliti menemukan pekerja anak yang masih bekerja membantu perekonomian keluarga di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Dalam penelitian ini di klasifikasikan terdapat dua jenis data yakni data primer dan sekunder. Adapun data primer yang peneliti cari dari unit analisa dijadikan objek penelitian adalah

a. Data Primer penelitian

No	Data Yang Dicari	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Jumlah Pekerja Anak	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Wawancara (<i>in-dept interview</i> dan <i>elite interviewing</i>)
2		APINDO Kab Probolinggo	Wawancara (<i>in-dept interview</i> dan <i>elite interviewing</i>)
3		Pimpinan Ponpes	Wawancara (<i>in-dept interview</i> dan <i>elite interviewing</i>)
4	Jumlah Keluarga penerima manfaat	Dinas Sosial	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)

Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi berupa dokumen yang terkait dengan Pekerja anak dan jumlah penerima manfaat keluarga harapan di Kabupaten Probolinggo.

b. Data Sekunder Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan pengumpulan data guna mendapatkan informasi atau masukan bahan-bahan yang sesuai. Dalam pengumpulan data digunakan 2 metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan metode Tanya jawab dengan informan. Dalam pelaksanaan wawancara dapat dilakukan Tanya jawab secara langsung bertemu atau bahkan lewat media telfon guna mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang akan di teliti. Wawancara dilaksanakan ke 11 orang diantaranya adalah Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Sosial, Kabid Disnaker, Kasi Disnaker, Ketua Apindo dan pimpinan pondok pesantren masing-masing shalter 6 orang. Sedangkan dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah mencar data yang terkait dengan penelitian. Dokumen yang dicari selama penelitain yaitu foto selama pelaksanaan program PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo tahun 2013.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penetapan Penerima Manfaat

Pada Data anak penerima manfaat program PPA-PKH tahun 2013 di Kabupaten Probolinggo sesuai target, sasaran dan kriteria yang telah di tetapkan dalam pedoman umum program PPA-PKH, adapun target penarikan pekerja anak Tahun 2013 sebanyak 10.750 orang dari 84 kabupaten/kota pada 21 provinsi, Sehingga dari kabupaten Probolinggo sendiri akan menarik pekerja anak 180 orang yang dibagi menjadi 6 (enam) Shelter.

Tabel 1.
Daftar anak Penerima Program PPA-PKH

NO	NAMA SHELTER/KECAMATAN	PENARIKAN		REKOMENDASI KE PENDIDIKAN						
		TARGET	REALISASI	SD	SMP	SMA	PAKET A	PAKET B	PAKET C	KETERAMPILAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BLK KRASAAN (SHELTER A - B) KEC. KRASAAN	60	60				8	37	9	3
2	PP. MIFTAHUL JANNAH (SHELTER A - B) DS. WANGKAL KEC. GADONG	60	60	1	11	2	7	27	5	7
3	PP. RAUDLOTUS SALAFIYAH (SHELTER A - B) DS. TONGAS KEC. TONGAS	60	60	4	1	10	34	5	8	

Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Probolinggo

Pada Tabel di atas menunjukkan indikator bahwa para penerima manfaat banyak yang lebih memilih untuk kejar paket A,B,C dikarenakan oleh hasil wawancara yang di dapat dari bapak Mahmudi. SH. M,Hum selaku kepala Bidang Tenaga Kerja menyebutkan bahwa :

”Pada dasarnya masyarakat pedalaman di Kabupaten Probolinggo khususnya para orang tua penerima manfaat belum menyadari bahwa akan pentingnya pendidikan bagi putra putri mereka, oleh karenanya mereka lebih memilih paket A,B,C untuk mendaftar bekerja ke toko ataupun sebagai karyawan biasa, kalau dari anak penerima manfaaat memilih ke sekolah formal lebih banyak yang akan mereka dapatkan selain ijazah saja tetapi mereka akan mendapatkan ilmu yang secara utuh dan lengkap sehingga dapat menambah wawasan dari anak- anak.”

Dari hasil analisis data dan hasil dari wawancara bahwa dalam penetapan penerima manfaat ini selain anak yang di beri pemahaman akan pentingnya sekolah formal tetapi diberikan juga pengarahan atau penjelasan kepada orangtua penerima manfaat bahwasanya pendidikan itu berguna bagi si anak dan akan berguna juga bagi keluarga mereka, seperti contoh apabila anak itu memilih untuk kembali ke sekolah formal dan mengenyam pendidikan dan mendapatkan ilmu sehingga berprestasi maka anak itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya

semisal ke bangku perkuliahan dengan biayaaya mengajukan usulan beasiswa prestasi maka anak itu akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, dan sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

Sasaran anak penerima manfaat PPA-PKH adalah pekerja anak usia 7 s/d dibawah 18 tahun yang putus sekolah dari RTSM hasil survey BPS untuk Program Keluarga Harapan yang diperoleh dari data TNP2K dan UP-PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo (BPS 2013).

Adapun kriteria penarikan pekerja anak dilakukan berdasarkan skala prioritas, yang pertama pekerja Anak dan atau Anak yang bekerja dari RTSM yang putus sekolah dan berusia 7sampai dengan 15 tahun, yang putus sekolah dan bekerja pada Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).Pekerja Anak dan atau Anak yang bekerja dari RTSM, yang putus sekolah dan berusia antara > 15 tahun sampai dengan < 18 tahun.

Apabila kuota penerima manfaat program PPA-PKH berdasarkan prioritas a sampai dengan d masih belum terpenuhi, maka pendamping dapat berkoordinasi dengan UP-PKH untuk meminta data tambahan pekerja anak atau anak yang bekerja dan atau anak yang putus sekolah dari RTSM peserta Program Keluarga Harapan dan yang bersangkutan dapat menjadi penerima manfaat PPA-PKH. Dan apabila kuota penerima manfaat program PPA-PKH berdasarkan prioritas a sampai e masih belum terpenuhi, maka Penanggung Jawab PPA-PKH kabupaten Probolinggo menyampaikan permasalahan tersebut kepada Penanggung Jawab PPA-PKH Pusat untuk diberikan kebijakan lebih lanjut.

Berdasarkan data dari UP-PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, yang telah di verifikasi oleh Tim verifikasi Kabupaten, Pendamping melakukan validasi data melalui kunjungan rumah (*home visit*) ke RTSM, untuk mencocokkan data pekerja anak calon penerima manfaat PPA-PKH sesuai jumlah

kuota dan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam pedoman umum dan pedoman operasional PPA-PKH Tahun 2013.

Data sebagaimana dimaksud pada butir a dibagikan kepada 18 (delapan belas) orang pendamping, dimana masing - masing pendamping berkewajiban untuk mendapatkan pekerja anak calon penerima manfaat PPA-PKH sebanyak 10(sepuluh) orang, yang tersebar di 24 (dua puluh empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pada saat kunjungan rumah pendamping melakukan sosialisasi, penjelasan dan motivasi kepada orang tua dan anak tentang PPA-PKH dan manfaatnya. Agar orang tua dan anak mempunyai komitmen akan pentingnya pendidikan sehingga orang tua mengizinkan anak untuk ikut kegiatan PPA-PKH.

Apabila pekerja anak dan orang tua bersedia ikut dalam PPA-PKH maka pendamping mengisi formulir tentang biodata pekerja anak calon penerima manfaat PPA-PKH dan orang tua menandatangani surat pernyataan yang mengizinkan anak untuk ikut PPA-PKH. Apabila pekerja anak dan atau orang tua tidak mengizinkan anak untuk ikut PPA-PKH, maka orang tua menandatangani surat pernyataan tidak mengizinkan anak untuk ikut kegiatan PPA-PKH disertai dengan alasannya, data ini diperlukan untuk bahan evaluasi.

Jika jumlah kuota pekerja anak telah terpenuhi, maka kunjungan rumah (*home visit*) dihentikan. Data pekerja anak hasil kunjungan rumah di tuangkan dalam Formulir Tentang Rekapitulasi Data Pekerja anak calon penerima manfaat PPA-PKH Tahun 2013, kemudian data di sampaikan kepada Penanggungjawab PPA-PKH Kabupaten untuk ditetapkan dalam SK Penanggung Jawab PPA-PKH sebagai anak penerima manfaat PPA-PKH Tahun 2013.

Pendampingan Pekerja Anak di Shalter

Untuk mengembalikan pekerja anak kependidikan memerlukan berbagai strategi dan pendekatan karena pekerja anak pada umumnya sudah lama meninggalkan bangku sekolah dan terlibat dalam lingkungan pekerjaan, sehingga ketika akan kembali ke sekolah mereka mengalami berbagai kendala (kurang percaya diri, motivasi rendah), karenanya perlu dilakukan pendampingan terhadap

pekerja anak agar mereka termotivasi untuk kembali ke pendidikan. Pendampingan pekerja anak di 6 (enam) shelter di Kabupaten Probolinggo dilakukan selama 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 14 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013 oleh pendamping dan tutor.

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo Bpk Mahmudi SH, M.Hum mengenai Sejauh mana Implementasi Program PPA – PKH di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

“Sejauh ini dalam proses berjalannya Program PPA – PKH ini Alhamdulillah sudah berjalan dan sudah sampai dalam Pendampingan di Shelter, sejak di mulainya program Nasional dalam pengentasan keluarga sangat miskin melalui Program Pengurangan pekerja anak pada tahun 2008 Kabupaten Probolinggo telah berhasil mengimplementasikan program ini. Pada tahun 2008 jumlah peserta PPA – PKH ada 180 anak yang terbagi 6 Shelter, tahun 2009 kegiatan ini tidak ada dari pusat dan berjalan kembali pada tahun 2010 yang pesertanya 60 anak terbagi ke dalam 2 shelter, tahun 2011 jumlah pesertanya 60 anak terbagi 2 shelter, tahun 2012 180 anak terbagi 6 shelter dan pada tahun 2013 180 anak terbagi dalam 6 shelter. Memang pada tahun 2013 banyak anak yang semangat belajarnya kurang lebih memilih mengambil kejar paket A,B,C daripada ke sekolah formal, tetapi pada tahun sebelumnya banyak anak yang lebih memilih untuk kembali ke sekolah formal karena mereka sangat antusias untuk belajar tetap terkendala masalah ekonomi keluarga mereka.”

Pendampingan di Shelter dibutuhkan untuk menjembatani pengembalian Pekerja Anak ke dunia pendidikan. Hal ini diperlukan mengingat anak yang sudah bekerja dan sudah lama meninggalkan bangku sekolah telah terbiasa mendapatkan uang, berada di ruang bebas dan sulit untuk diatur, pada umumnya mereka cenderung merasa minder dan biasanya sulit untuk dikembalikan ke sekolah.



Sumber : Dokumen Pribadi 2014

Pada foto di atas waktu di lakukan wawancara terhadap bapak kepala Dinas dan beliau mengajak beriteraksi langsung ke anak yang sedang beristirahat di sela pembelajaran di shalter dan mengajak saya mengetahui lebih dalam dari kebiasaan dan prilaku dari para pekerja anak yang kebanyakan masih perlu pembelajaran sopan santun dan kurangnya ber attitude.

Pendampingan dishelter dilakukan selama 1(satu) bulan dengan tujuan untuk memotivasi anak agar mempunyai keinginan untuk kembali ke dunia pendidikan. Selain itu mempersiapkan anak kembali ke sekolah dengan memberikan pelajaran yang di butuhkan agar mereka siap kembali ke sekolah, dan dapat mengikuti pelajaran. Dan memberikan penilaian terhadap anak selama masa pendampingan sesuai minat dan kemampuan anak dalam rangka pengembalian mereka ke dunia pendidikan.

Di Kabupaten Probolinggo mendapat alokasi jumlah peserta penerima manfaat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) anak dimana masing – masing shelter terdapat 30 (tiga puluh) anak. Adapun hasil wawancara kepada salah satu peserta program PPA – PKH yang bernama Adi Putra yang berusia 14 tahun berasal dari Desa Jurang Rejo Kecamatan Gading, hasil dari wawancara sebagai berikut :¹

“Selama saya mengikuti Program PPA – PKH ini saya merasa gembira karena saya bisa melanjutkan sekolah saya kembali karena saya mempunyai

¹Hasil wawancara dengan pekerja anak penerima manfaat PPA - PKH, Sabtu 31 Mei 2014

cita – cita sebagai petani yang sukses tetepi kalau saya tidak sekolah saya akan sulit untuk menggapai impian saya. Sebelum saya mengikuti program ini saya sehari – harinya membanu orang tua saya mencari rumput untuk pakan kambing dan jika pada massa tanam atau panen di sawah saya juga sebagai buruh tani juga untuk membantu menambah penghasilan orang tua saya. Setelah saya ada di shalter ini saya di daftarkan kembali ke sekolah untuk melanjutkan sekolah saya dan mengejar cita – cita saya, selama di shalter saya di ajarkan tentang pentingnya pendidikan di zaman sekarang dan tetap optimis belajar yang tinggi karena pemerintah telah memfasilitasi sampai sekolah menengah atas.”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa anak penerima manfaat merasa senang dan bertrimakasih atas adanya program nasional ini yang di mana para anak dapat bisa melanjutkan mimpi mereka dengan melanjutkan sekolah mereka. Dari beberapa anak yang saya temui dan saya ajak mengobrol terlihat sangat antusias sekali karena mereka berharap untuk masa depan mereka dan keluarga mereka supaya lebih baik lagi.

Adapun kendala yang dihadapi dari pelaksanaan pendampingan di Kabupaten Probolinggo tidak sesuai jadwal yang ditentukan oleh Tim Pelaksana Pusat, hal tersebut dikarenakan data awal yang digunakan menggunakan data dari TNP2K yang hanya mendapatkan data valid sebanyak 4% dari jumlah data yang diterima sebanyak 1.997 sehingga setelah Tim Pelaksana Kabupaten Probolinggo mengkonfirmasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Provinsi maka diputuskan untuk mengambil data dari UP PKH Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang akhirnya kuota peserta terpenuhi, dan pelaksanaan di Kabupaten Probolinggo baru terealisasi pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013.

Rekomendasi hasil pendampingan selama di shelter dari pendampingan dan tutor diserahkan kepada Penanggung Jawab program PPA-PKH untuk ditindaklanjuti. Penanggung Jawab Program PPA-PKH Kabupaten Probolinggo telah meneruskan rekomendasi hasil pendampingan di shelter kepada Dinas yang

Membidangi Pendidikan dan Keterampilan, agar anak difasilitasi untuk kembali ke dunia pendidikan, yaitu :

1. Pendidikan Formal (SD, SMP, SMU, SMK).
2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C).
3. Pendidikan Pondok Pesantren.
4. Pendidikan Keterampilan / Kursus – Kursus (BLK).



Sumber : Dokumen Pribadi 2014

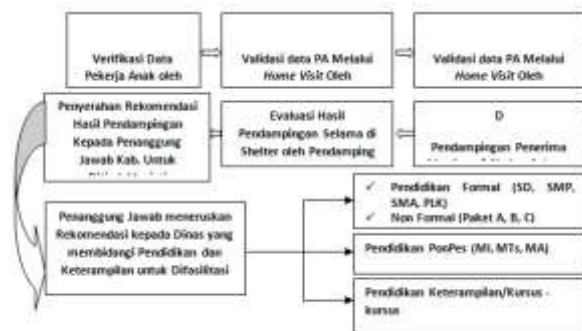
Pada foto di atas waktu pembelajaran anak di shalter mereka di tugaskan oleh tutor untuk menuliskan cita – cita dan keinginannya setelah menerima program PPA – PKH ini, banyak cita – cita ataupun keinginan dari mereka diantaranya ada yang menginginkan untuk kembali bersekolah, ada yang ingin menjadi pengusaha, dll yang masing – masing menuliskan ke dalam kertas warna putih untuk para anak laki – laki dan warna pink untuk anak perempuan lalu di tempelkan di depan kelas supaya mereka mengingat tujuan mereka mengikuti program ini salah satunya mencapai cita – cita mereka masing – masing.

b. Monitoring pelaksanaan dan Mekanisme Program PPA-PKH

Mengacu pada dasar Pelaksanaan Program PPA-PKH, dengan prioritas sasaran penerima manfaat yang telah terseleksi oleh tim pendamping yang melakukan Home Visit ke rumah – rumah calon penerima manfaat. Kunjungan rumah (*home visit*) ke RTSM dilakukan oleh pendamping di Kabupaten Probolinggo untuk memperoleh data calon penerima manfaat program PPA-PKH. Validasi data dilakukan oleh pendamping berdasarkan data hasil pengolahan yang telah dilakukan oleh Tim pengolah data ditingkat pusat. Data hasil kunjungan rumah

akan diseleksi oleh Tim Pelaksana Teknis Tingkat Kabupaten untuk menetapkan penerima manfaat Program PPA-PKH yang memenuhi persyaratan, sesuai jumlah kuota yang ditetapkan. Dengan acuan bagan mekanisme pada Program PPA-PKH berikut :

Tabel 2.
Bagan Mekanisme Program PPA-PKH



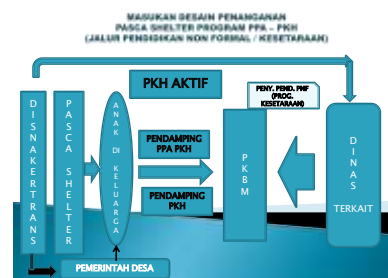
Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Probolinggo

Dari Bagan di atas dapat kita lihat bahwa alur dari penarikan pekerja anak melalui proses yang sangat selektif sehingga perlu pemantauan di dalam pengimplementasian program ini, yang di mulai dari proses verifikasi data, penarikan pekerja anak dari masing – masing orang tua dan pelaksanaan pendampingan selama 1 bulan di shelter dan pengelompokan para penerima manfaat ke masing – masing yang mereka inginkan.

c. Monitoring Pasca Pendampingan

Setelah pendampingan dilakukan kunjungan rumah (Home Visit) pasca pendampingan di shelter, untuk menjaga komitmen orang tua dan anak terhadap pendidikan. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melakukan koordinasi dalam rangka memfasilitasi pengembalian anak ke dunia pendidikan, melalui program – program yang ada di instansi yang membidangi pendidikan termasuk Lembaga Pendidikan Swasta, Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan formal (SD,SMP,SMU,SMK), pendidikan kesetaraan (paket A,B,C), yang terdapat di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, dengan harapan pekerja anak dapat difasilitasi di pendidikan formal dengan melibatkan pendamping PPA-PKH dan dukungan dari keluarga penerima manfaat. Sehingga jika pekerja anak tersebut sudah tertangani maka diharapkan juga para pekerja anak tersebut juga mendapatkan kembali nomor PKH nya, sebagai biaya selama menempuh pendidikan.



Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Probolinggo.

Pada desain diatas tidak jauh berbeda dengan desain penanganan pasca shelter sebelumnya, hanya saja pada desain ini lebih cenderung mendorong pekerja anak untuk mengikuti pendidikan di program kesetaraan yang terdapat di PKBM. Pada desain ini juga mengharapkan para pekerja anak tersebut juga mendapatkan kembali nomor PKH nya.

E. Kesimpulan

1. Dalam pengimplementasiannya Program PPA – PKH ini masih kurang koordinasi antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, karena masih ditemukannya kerancuan data penerima manfaat Program yang awalnya data dari TNP2K kurang valid sehingga takut penerima manfaat tidak tepat kepada yang membutuhkan maka dilakukan koordinasi dengan pusat maka di ambil data dari UP PKH yang di dapat dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
2. Selama ini kita hanya melihat permasalahan itu hanya pada anak, perlu “program parenting” untuk sinkronisasi antara perubahan pola pikir anak dan orang tua / keluarga terhadap pendidikan yang nanti kedepannya pendidikan itu akan menolong keluarga tersebut dari sisi ekonomi, yang dimana jika

pendidikan anak tinggi maka anak akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan akan mendapatkan upah yang lumayan atau anak akan membuka lapangan pekerjaan dengan di dapatkannya ilmu dari mereka kembali bersekolah

3. Tindak lanjut dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo menugaskan pendamping melaksanakan kunjungan home visit, dan menjelaskan tentang pelaksanaan program PPA-PKH serta pentingnya peningkatan wajib belajar 9 tahun dan upaya mengurangi jumlah pekerja anak pada keluarga sangat miskin.
4. Pekerja anak sebagai penerima manfaat bila dapat di dampingi dengan baik, akan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang bekerja dengan berbagai jenis pekerjaan yang akan menjadi lebih maju. Kesempatan itu tidak dapat di peroleh bila mereka tidak berada dalam pembinaan yang intensif. Dengan diberlakukan pembinaan pra shelter, selama di shelter dan pasca shelter, maka penerima manfaat dapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai haknya, sehingga dapat meningkatkan kapasitas sebagai sumberdaya bangsa dalam meneruskan pembangunan nasional.
5. Pengembalian Anak Kedunia Pendidikan Pasca Shelter Bukan Hanya Tanggung Jawab Pendamping PPA-PKH, Tapi Diharapkan Juga Merupakan Tanggungjawab Pendamping PKH (PPA-PKH Ada Karena Ada PKH).

F. Saran

Setelah sekiranya mampu memahami beberapa persoalan yang terjadi, maka ada beberapa saran pertimbangan yang sekiranya dapat dipetik dari karya ilmiah ini, yang dirangkum sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kepada Instansi terkait agar pekerja anak yang telah ditarik dari tempat kerja dapat difasilitasi untuk kembali kedunia pendidikan.
2. Kerjasama dengan berbagai sektor, kekompakan dalam tim kerja dan koordinasi antara pelaksana merupakan prasyarat utama terlaksananya pedoman ini. Semua pihak perlu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bahwa anak Indonesia harus maju dan sukses, serta terwujudnya “Masa Depan Tanpa Pekerja Anak”.

Perlunya konsistensi untuk Program ini dari Dinas, LSM dan yang terpenting adalah keluarga anak supaya program PPA-PKH bermuara pada tujuan yang ditetapkan, dengan prioritas untuk kepentingan dan penyelamatan pendidikan anak, agar anak dapat memperoleh haknya untuk dapat tumbuh berkembang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2006, *Childe Abuse (kekerasan pada anak)*, Penerbit Nuansa, edisi revisi
- Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendi, Sofian, 1989, *Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi: Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif* (Yogyakarta: UGM Monograph)
- Gaffar Afan, 2009 *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1* Yogyakarta: Pusaka Pelajar
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, alfabeta
- Lexy, Moleong. 1999 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Pusda Karya
- Nugroho, Riant, 2004. *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia
- Nurcholis, Hanif, dkk, 2010, *Pedoman Pengembangan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Pedoman Pendampingan PPA-PKH Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (2013)
- Suharno. 2008, *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 (Website Resmi : <http://www.probolinggokab.go.id>)